

CATATAN KRITIS KEBIJAKAN RANCANGAN APBD PROV. RAU TAHUN 2014

A. Kebijakan Pendapatan dan Pembiayaan

1. Proyeksi Pendapatan di Angka Pesimis

Kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), untuk Rencana anggaran Pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Provinsi Riau tahun 2014 telah diserahkan kepada DPRD Provinsi Riau untuk dibahas. RABPD Provinsi Riau dalam KUA-PPAS pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp. 6,963 Triliun dan Belanja Daerah Rp. 7,676 Triliun. Sedangkan penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun 2013 diprediksi 712 Miliar. Proyeksi pendapatan yang disusun oleh pemerintah daerah yang diajukan kepada DPRD Provinsi Riau, kita menilai pemerintah daerah pesimis dalam memproyeksikan target pendapatan daerah dan berpotensi melakukan manipulasi proyeksi SILPA tahun anggaran 2013. Dengan alasan sebagai berikut .

Target pendapatan tahun anggaran 2014 direncanakan oleh pemerintah provinsi Riau sebesar Rp. 6,963 Triliun. **Target pendapatan tahun 2014 menunjukkan pemerintah daerah tidak serius dalam mendongkrak kebijakan pendapatan daerah untuk kebutuhan pembangunan daerah.** Jika dilihat dari trend pendapatan daerah realisasi tahun anggaran 2012 dan target APBD perubahan tahun 2013, pemerintah hanya berani menargetkan pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2014 sebesar 0,7 Persen dari tahun 2012 dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 6,915 triliun. Sedangkan jika dilihat dari proyeksi pendapatan APBD tahun 2013 proyeksi pendapatan hanya tumbuh 0,4%.

Rendahnya pertumbuhan target pendapatan daerah tahun 2014, akibat **tidak kreatifnya aparat pemerintah** dalam melakukan kebijakan perencanaan pendapatan. Hal itu dibuktikan dengan rencana kebijakan yang perencanaan pendapatan daerah yang dilakukan setiap tahunnya tidak berubah dari tahun ketahun sebagai mana dituangkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA). Tahun 2012 dalam KUA PPAS kebijakan perencanaan pendapatan daerah hanya itu-itu saja. Dan bahkan dalam KUA tahun 2014

kebijakan perencanaan pendapatan juga tidak berubah masih itu-itu saja. Begitu juga kebijakan pemerintah dalam upaya – upaya mencapai target pendapatan KUA tahun 2012 dengan KUA tahun 2014 tidak juga mengalami perubahan.

Jika dilihat dari tren antara proyeksi APBD Murni, APBD Perubahan tahun 2012-2013, dan realisasi kecenderungan pemerintah terus melampaui target pendapatan dari yang diproyeksikan sebelumnya. tahun 2012 misalnya antara realisasi pendapatan daerah melebihi target proyeksi mencapai 30 Persen, begitu juga tahun 2013 antara APBD Murni dengan target pada APBD Perubahan meningkat hingga 4 Persen. Minimnya proyeksi pendapatan daerah juga akan berpotensi memberikan ruang korupsi sector pendapatan.

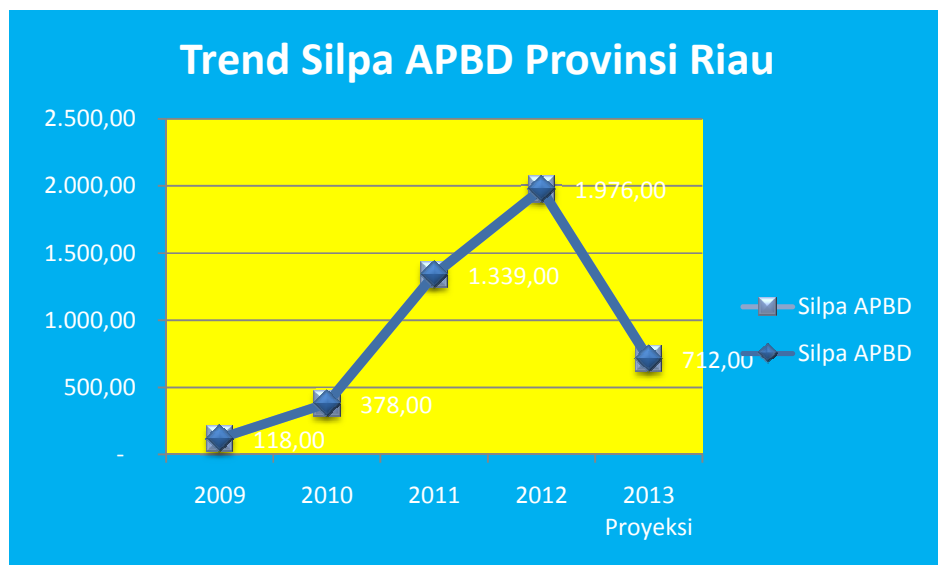
2. Proyeksi SILPA APBD 2013 Belum Rasional,

Belanja daerah direncanakan tahun 2014 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. tahun 2014 direncanakan belanja daerah sebesar Rp. 7,6 Triliun sementara tahun 2013 sebesar 8,9 Triliun pada APBD perubahan atau turun sebesar 14%. Penurunan belanja 14% tersebut tentu dikarenakan SILPA tahun anggaran 2013 direncanakan hanya Rp.712 Milyar atau hanya bersisa 8 persen dari total belanja. Perencanaan proyeksi SILPA tahun 2013 bisa dikatakan syarat manipulasi, dan belum menggambarkan atau belum mendekati angka yang sebenarnya. Hal itu bisa diprediksi dari bagaimana realisasi anggaran di tahun 2013 yang hingga pertengahan November baru terealisasi dibawah 60% dari total belanja Rp, 8,9 Triliun, dengan demikian bagaimana mungkin tahun 2013 penyerapan anggaran bisa mencapai 92 persen. Padahal Penyusunan RAPBD tahun 2014 disusun diakhir tahun 2013, yang tinggal 1 bulan lagi. Dengan demikian maka seharusnya SILPA tahun berjalan sudah bisa prediksi mendekati angka yang sebenarnya.

Jika dilihat pelaksanaan anggaran tahun 2013, hampir sama kondisinya dengan penyerapan anggaran tahun 2012 yang hingga akhir tahun baru berkisar dibawah 60%. Dengan demikian bisa diprediksi jika SILPA tahun 2013 mencapai Rp. 2,2 triliun. Dengan perkiraan realisasi anggaran belanja tahun 2013 hanya terealisasi 75% bukan 92%.

Dengan demikian kita meminta rasionalisasi kepada pemerintah daerah terkait dengan kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang telah disusun dalam KUA-PPAS

tahun 2014, dan mempublikasikan secara luar terhadap penjabaran secara rinci sumber penerimaan daerah. Selin itu meminta pemerintah daerah merasionalisasikan proyeksi SILPA yang disusun dalam KUA –PPAS 2014. Dan meminta update realisasi anggaran APBD tahun 2013 sampai saat ini baik belanja maupun pendapatan. Sebagai dasar perhitungan proyeksi SILPA tahun berjalan.



3. Laba BUMD Rentan Manipulasi

Salah satu sumber pendapatan daerah Provinsi Riau berasal dari Pendaparan Asli Daerah (PAD). PAD bersumber dari Pajak daerah, Retribusi, Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan dan Pendapatan lain yang disahkan sesuai peraturan perundang-undang. Sebagai penambahan sumber pendapatan daerah Provinsi Riau memberikan investasi / penyertaan modal kepada 10 BUMD di Provinsi Riau yang sampai 31 Desember 2012 lalu mencapai total Rp. 1.185. 717.028.770,- tahun 2012 terjadi peningkatan dari tahun 2011 yang pada waktu itu penyertaan modal pemerintah provinsi Riau kepada BUMD sebesar Rp. 943.643.626.814,-. Penyertaan modal ini diluar penyertaan modal yang masuk ke perusahaan PT. Riau Air Line.

Pada dasarnya hasil dari penyertaan modal kepada perusahaan daerah tersebut telah memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah. Namun, hanya saja kontribusi

yang diberikan masih belum menggambarkan besarnya penyertaan modal yang diikuti sertakan dalam BMD tersebut. Tahun 2012 lalu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (laba BUMD) terealisasi sebesar Rp. 139 Miliar. Sementara tahun 2013 diperkirakan pada anggaran perubahan sebesar Rp. 139 Miliar. Artinya tahun 2012 dan 2013 hasil dari penyertaan modal pemerintah kepada BUMD tidak mengalami peningkatan. Sementara tahun 2014 mendapatang direncanakan hasil laba BUMD yang disertakan kepada Provinsi Riau sebesar Rp. 144,7 Miliar. Memang, pendapatan dari Laba BUMD ini meningkat, namun peningkatannya tidak signifikan dari tahun ketahun. Dengan rata peningkatan 3 persen saja.

Terkait persoalan penyertaan modal pemerintah daerah, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Riau tahun 2012 lalu, menemukan penyertaan modal illegal sebesar Rp. 442 Miliar. Disebut illegal karena penambahan penyertaan modal kepada BUMD tidak disarari revisi peraturan daerahnya. Padahal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang (Permendagri nomor 37 tahun 2011) tentang pedoman penyusunan APBD disebutkan penyertaan modal pemerintah menggunakan legalitas Peraturan Daerah. Dan jika kana menambah penyertaan modal yang nilainya melebihi ketentuan dalam Perda tersebut maka Ekkutif dan Legislatif harus merevisi terlebih dahulu. **Selain itu**, terdapat Rp. 326 Miliar nilai penyertaan modal APBD kepada BUMD yang tidak berada pada penguasaan BUK pemerintah daerah Provinsi Riau. Dengan demikian penyertaan modal yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan oelh pemerintah daerah provinsi Riau itu akan berpotensi disalahgunakan oleh orang-orang yang tertentu.

Oleh karena itu, pemerintah daerah provinsi Riau seyogyanya memperjelas status penyertaan modal yang menjadi temuan BPK RI tahun 2012 tersebut dengan mengajukan revisi Perda tentang penyertaan modal nomor 7 tahun 2009 tentang penyertaan modal pemerintah kepada BUMD. Selain itu, memberikan target penerimaan yang lebih realistis dan rasional untuk mengantisipasi kebocoran – kebocoran penerimaan daerah dari pendapatan yang berasal dari laba BUMD.

B. Kebijakan Rencana Belanja Daerah

Dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945 (amandemen), setidaknya memuat tiga asas pengelolaan keuangan Negara/daerah. Yaitu Prinsip Transparan (terbuka), Bertanggung Jawab, dan Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ini juga dipertegas dalam pasal 4 UU Nomor 17 tahun 2013 tentang keuangan Negara, bahwa prinsip terbuka, bertanggung jawab, untuk kemakmuran rakyat. Dengan diperjelas dengan prinsip efisiensi, efektif dan ekonomis dalam pengelolaan keuangan Negara.

Membaca dan menganalisa rancangan kebijakan keuangan RAPBD tahun 2014 Provinsi Riau, terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan, sebagai berikut :

1. Pemborosan di Belanja Pegawai,

Tahun 2014 direncanakan alokasi anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp. 976,097,713,706 jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya peningkatan mencapai 2 persen. Besarnya alokasi anggaran belanja pegawai ini dikarena besarnya belanja tunjangan para pegawai yang mencapai 35% dari total anggaran belanja pegawai. Belum lagi alokasi belanja pegawai yang masuk dalam belanja langsung dengan besaran anggaran yang tidak kalah kecil. Secara persentase anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai juga jauh meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2013 dengan total APBD 8,9 Triliun belanja pegawai mencapai 11%. Sementara tahun 2014 ini direncanakan meningkat menjadi 17% dari total belanja daerah.

Faktanya, pemberian alokasi belanja pegawai yang tinggi tidak berkorelasi dengan peningkatan kinerja aparatur dan bahkan kinerja aparatur melemah hal itu dibuktikan dengan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan program tahun 2013 ini. Oleh karena itu, perlu adanya rasionalisasi peningkatan belanja gaji para pegawai. Dan pemberian remunerasi (tunjangan) tidak diberikan kepada pegawai yang nol prestasinya.

2. Anggaran Aparatur Pada Belanja Langsung Pemborosan

Perilaku boros aparaturnya pemerintah masih terus terjadi dibuktikan dengan besarnya **belanja** operasional aparaturnya pada Rencana APBD tahun 2014, yang menghabiskan anggaran secara persentase mencapai 7% dari total APBD Provinsi Riau tahun 2014. Seperti ATK, Pembelian Baju, Prasarana Aparatur, kendaraan dinas dan lain-lain. Hal itu jelas bertentangan dengan pasal 23 ayat 1 UUD 45 yang mengamatkan alokasi keuangan Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meminimalisir anggaran operasional aparaturnya pemerintah di tahun 2014 kedepan.

3. Boros Anggaran Perjalanan Dinas

Berkaca dari tahun sebelumnya (2013) anggaran perjalanan dinas (eksekutif dan Legislatif) mencapai 4% dari total APBD Riau. Tahun 2014 kembali anggaran APBD disedot untuk belanja perjalanan dinas yang mencapai 6% dari total APBD. Dengan demikian maka perlu diminimalisir anggaran perjalanan dinas dengan dilakukan pemangkasan dari pagu-pagu anggaran perjalanan dinas yang ada dengan cara merasionalisasikan dengan kondisi senyatanya. Sebagai catatan, anggaran perjalanan dinas kerap kali menjadi temuan oleh BPK RI hampir terjadi setiap tahun anggaran.

4. Belanja Modal Tidak Menjamin Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Riau tahun 2014 merencanakan anggaran untuk belanja modal mencapai 30% dari total APBD Provinsi Riau tahun 2014. Namun, besarnya alokasi belanja modal sebagai tujuan untuk peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, masih jauh dari harapan. Karena, pemerintah tahun 2014 masih menganggarkan belanja modal untuk pembangunan yang tidak penting dan tidak berkorelasi terhadap kesejahteraan masyarakat Riau.

Dari 30% belanja modal yang dialokasikan dalam RAPBD tahun 2014, lebih dari 10% nya digunakan untuk pembangunan – pembangunan yang tidak penting. Pembelian mobil dinas, dan pengadaan barang – barang yang digunakan untuk fasilitas aparaturnya pemerintah. Dengan demikian artinya anggaran belanja modal yang besarnya mencapai 30% tersebut tidak sepenuhnya untuk membangun wilayah yang terisolir.

5. RAPBD 2014 Mengabaikan Kesejahteraan Perempuan dan Anak.

Fakta menyebutkan, tingginya angka kematian ibu dan anak di Provinsi Riau sesuai LKPJ Riau 2008-2013 yang masih diangka 192/1000 kelahiran. Selain itu, tingginya

kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di Provinsi Riau ini. Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa Pemerintah belum menjadikan kebutuhan dasar perempuan itu menjadi prioritas daerah. Dilihat dari anggaran tahun 2013 lalu anggaran untuk kematian ibu dan anak (program) hanya dialokasi 0,003% dari total anggaran yang ada. Sedangkan tahun 2014 ini pemerintah masih belum melihat persoalan dasar itu menjadi perhatian khusus karena tahun 2014 dalam RAPBD hanya dianggarkan dibawah 1% dari total belanja daerah Provinsi Riau 2014.

Dengan demikian perlu adanya kesadaran pemerintah untuk memperhatikan secara khusus terkait kebutuhan dasar yang menjadi hak perempuan dan anak. Sehingga tidak terkesan pemerintah Provinsi Riau mengabaikan hak-hak perempuan dan anak. Seyognya pemerintah harus mengalokasikan anggaran secara khusus untuk perempuan dan anak yang sesuai dengan kebutuhan.

6. Kesehatan dan Pendidikan Belum Sesuai Undang – Undang.

Persoalan pendidikan dan kesehata masih menjadi perhatian utama di Provinsi Riau. Namun jika melihat dari distribusi anggaran untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan Provinsi Riau belum memenuhi standar minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 49 UU 20 tahun 2003 tentang sistempendidikan nasional dan pasal 171 UU 39 tahun 2009 tentang kesehatan. Bahwa anggaran pendidikan harus 20% dari total belanja daerah dan belanja kesehatan harus 10% dari total belanja dalam APBD. **Oleh karena itu**, taun 2014 anggaran pendidikan minimal Rp. 1,4 Triliun dari total APBD dan kesehatan minimal Rp. 761 Milyar dari total APBD tahun 2014.

7. Pemangkasan Pagu Indikatif

Saah satu factor penyebab SILPA APBD Riau terus mengalami peningkatan setiap tahun, selain dari factor-faktor lainnya juga akibat dari tingginya pagu indikatif yang dianggarkan dalam APBD. Sementara realisasinya jauh lebih rendah dari pagu indikatif yang direncanakan. Pagu indikatif yang selalu dianggarkan tinggi berada pada pos belanja barang dan jasa yang megakibat silpa akhir tahun meningkat. Hal itu juga terjadi dalam RAPBD tahun 2014 ini. Oleh karena itu, kita berpandangan besarnya pagu indikatif yang tjauh dari angka ril yang dibutuhkan selain

mengakibatkan SIIPA diakhir tahun, juga rentan terjadinya korupsi. Dengan demikian pemerintah daerah perlu merasionalisasikan harga-harga yang menjadi acuan pemerintah dalam menyusun APBD. dan untuk tahun 2014 khusus pada belanja barang dan jasa dilakukan pemangkasa antara 15-20%. Hal itu berdasarkan kalkulasi tingkat inflasi dan peningkatan harga-harga di tahun 2014 ini.